

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan penulis mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam mengurangi Kesenjangan Pembangunan di Lamongan Selatan dengan menggunakan teori dari (Afifuddin, 2015), berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik penulis antara temuan lapangan berdasarkan 5 kriteria tersebut, yakni:

1. Fasilitas

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya fasilitasi pembangunan di wilayah Lamongan Selatan melalui penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RPJPD, dan RTRW), penyediaan infrastruktur dasar, serta kemudahan perizinan bagi investor. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa kualitas dan pemerataan fasilitas publik, khususnya infrastruktur jalan dan sarana penunjang ekonomi, masih belum setara dengan wilayah Lamongan bagian tengah dan utara. Oleh karena itu, aspek fasilitas masih memerlukan perhatian dan prioritas pembangunan yang lebih besar di wilayah selatan.

2. Pemerintah Daerah Harus Kreatif

Kreativitas Pemerintah Kabupaten Lamongan tercermin melalui upaya pencarian sumber pendanaan alternatif, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), serta promosi potensi daerah untuk menarik investor. Pemerintah juga mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan potensi wilayah dan melibatkan masyarakat

melalui mekanisme Musrenbang. Meskipun demikian, inovasi pembangunan ekonomi di Lamongan Selatan masih belum optimal, terutama dalam mendorong pemerataan investasi dan pengembangan industri agar tidak terpusat di wilayah tertentu.

3. Politik Lokal Yang Stabil

Stabilitas politik lokal di Kabupaten Lamongan relatif terjaga dengan baik melalui hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif, serta komunikasi yang berjalan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Kondisi ini mendukung keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah dan menciptakan iklim yang relatif stabil bagi kegiatan pembangunan dan investasi, termasuk di wilayah Lamongan Selatan.

4. Pemerintah Daerah Harus Menjamin Kestinambungan Berusaha

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berupaya menjaga kesinambungan usaha dan investasi melalui penyediaan kepastian hukum, kemudahan administrasi perizinan, serta penyelenggaraan forum investasi dan investor gathering. Upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan minat investor. Namun, persebaran investasi di wilayah Lamongan Selatan masih belum merata sehingga diperlukan strategi yang lebih terarah agar keberlanjutan usaha juga dapat mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

5. Pemerintah Daerah Harus Komunikatif dengan LSM/NGO Terutama dalam Bidang Perburuan dan Lingkungan Hidup

Komunikasi dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan LSM/NGO, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan isu

sosial, masih belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah telah membuka ruang dialog dan bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat, keterlibatan LSM dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan belum terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dengan LSM masih menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki untuk mendukung pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran dan masukan yang membangun, sebagai berikut:

- 1) **Pemerataan akses pelatihan tenaga kerja perlu ditingkatkan.** Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebaiknya memperluas sasaran peserta pelatihan tidak hanya bagi masyarakat dari wilayah penghasil tembakau, tetapi juga mencakup seluruh kecamatan di Lamongan Selatan yang memiliki potensi ekonomi dan industri yang dapat dikembangkan. Langkah ini penting agar peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat dirasakan secara merata serta mendukung kesiapan sumber daya manusia di seluruh wilayah.
- 2) **Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperkuat pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya jalan.** Mengingat sebagian besar infrastruktur jalan di Lamongan Selatan berada dalam kondisi rusak atau kurang layak, alokasi anggaran APBD maupun Dana Desa idealnya diperbesar untuk kegiatan rekonstruksi dan perbaikan jalan. Optimalisasi anggaran ini akan berkontribusi pada peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi mobilitas

masyarakat, serta mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri lokal.

- 3) **Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mengoptimalkan komunikasi dan kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).** Dalam setiap forum kolaboratif, baik yang melibatkan perguruan tinggi maupun unsur masyarakat, penting bagi pemerintah untuk menghadirkan LSM sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Pelibatan LSM tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan dan implementasi kebijakan daerah.